

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Bentuk Kebijakan Publik

Primas Anindyajati¹, Amdi Very Dharma²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia¹

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia²

Abstract. *This study discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor in the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate's environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism.*

Keywords. *Internal Control; Perception; Rule; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP.*

Abstrak Penelitian ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism.

Kata kunci. Pengendalian Internal; Peraturan; Persepsi; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; SPIP.

Corresponding author. Email: primas.anindyajati@live.com, averydharma@gmail.com.

How to cite this article. Anindyajati, P., & Dharma, A. V. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Suatu Bentuk Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 253–262.

History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17039

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sebagai penyelenggara pemerintahan pada Provinsi DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun pada tahun 2013 sampai dengan 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) dan baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan, efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kewajaran dari penyajian

LKPD (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Untuk mempertahankan opini WTP dari BPK, Pemprov DKI Jakarta harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai karena SPIP mempunyai pengaruh positif terhadap opini laporan keuangan pemerintah (Irawan, 2016). Pedoman SPIP diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi, dan efektifitas efisiensi pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan pada peraturan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Amanat mengenai pembuatan pedoman SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Pelaksanaan SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2010). Berdasarkan aturan tersebut pimpinan PD/OPD bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP pada PD/OPD yang dipimpinnya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2010). Penyelenggaraan SPIP mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina penyelenggaraan SPIP (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2010).

Fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah belum adanya pedoman penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu kebijakan publik. Penerimaan atau akseptabilitas staf/anggota organisasi atas suatu gagasan kebijakan memang merupakan hal yang perlu didapatkan. Hal ini didasarkan pada teori proses penyusunan kebijakan publik yang menyatakan bahwa

tahapan pertama dalam penyusunan kebijakan publik adalah pendefinisian tentang masalah kebijakan publik.

Penelitian terdahulu tentang bagaimana persepsi tentang SPIP dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dalam hal ini SPIP belum ditemukan. Penelitian terdahulu secara umum meneliti tentang bagaimana pengaruh penerapan SPIP pada entitas publik. Oleh karenanya, penelitian ini merupakan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya (*gap research*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan penelitian ini adalah bagaimana persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang Pedoman pelaksanaan SPIP BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan simpulan tentang isi pedoman yang lebih diterima di kalangan Inspektorat dan memberikan rekomendasi Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta tentang faktor faktor yang diperlukan dalam memproses penyusunan pedoman pelaksanaan sampai padatahap legitimasi (persetujuan).

Manfaat Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Inspektorat dan bagi akademik. Bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diperolehnya draft Pedoman pelaksanaan yang lebih diterima dan rencana aksi pemrosesan pembuatan Pedoman pelaksanaan lebih lanjut sampai dengan tahap legitimasi.

Sedangkan Bagi akademik, sebagai penambah referensi akademik dalam hal penggunaan teori institusional.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Melalui pencarian akademik, penulis tidak menemukan studi terdahulu tentang persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP sebagai suatu kebijakan. Penelitian terdahulu secara umum meneliti tentang bagaimana pengaruh penerapan SPIP pada Instansi yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Rahadian(2011), kebijakan publik adalah apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Suwitri (2014), kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wisesa, Hidayat dan Widowati (2005) adalah sebagai berikut standar dan sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dalam merumuskan kebijakan, terdapat tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan, tahapan pembuatan kebijakan yang Menurut Jones dalam Suwitri (2014), terdapat 11 (sebelas) tahapan pembuatan kebijakan.

Tahap pertama yaitu *perception/definition*, Pemerintah pertama-tama mendefinisikan masalah terlebih dahulu dalam proses pembuatan kebijakan. Tahap kedua adalah *aggregation*, Merupakan tahapan dimana sekelompok orang yang memiliki ide yang sejalan dengan kreator kebijakan dikumpulkan. Tahap ketiga adalah *organization*. Mengorganisasikan orang-orang yang memiliki pikiran yang sama tersebut kedalam sebuah organisasi formal; Tahap keempat, *representation*. Setelah terorganisir dan sudah memiliki organisasi

formal, selanjutnya mengajak kumpulan orang-orang yang memiliki pikiran yang sama untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar permasalahan dapat diagendakan.

Tahap kelima, *agenda setting*. Pembuat kebijakan telah memasukkan masalah ke dalam agenda.

Tahap keenam, *formulation*. Formulasi kebijakan merupakan tahapan paling kritis, merupakan tahapan yang melibatkan interaksi antara pemilik kepentingan dengan pembuat kebijakan yang memilih alternatif-alternatif penyelesaian masalah sehingga dapat memilih dan menghasilkan suatu alternatif yang terpilih. Tahap ketujuh, *legitimation*. Proses dimana dilakukan pengesahan atas alternatif yang telah dipilih. Tahap kedelapan, *budgeting*. Proses penganggaran dilakukan untuk implementasi kebijakan. Tahap kesembilan *implementation*. Proses pelaksanaan kebijakan publik setelah anggaran dicairkan, namun terkadang kebijakan publik harus tetap dilaksanakan walaupun anggaran belum dicairkan. Tahap kesepuluh *evaluation*. Melakukan penilaian untuk menilai faktor-faktor pendorong, penghambat, konteks, kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Tahap terakhir, tahap kesebelas, *adjustment/termination*. Tahap penyesuaian apakah kebijakan publik direvisi atau diakhiri karena jangka waktu kebijakan telah berakhir atau apakah karena kebijakan mengalami kegagalan.

Teori Institusional

Teori institusional berdasarkan Meyer dan Rowan dalam Ridha dan Basuki (2012) juga berangkat dari pemikiran bahwa suatu organisasi jika ingin bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) dan layak didukung. Untuk memperoleh legitimasi tersebut, menurut DiMaggio dan Powell dalam Carpenter dan Feroz (2001) terdapat mekanisme yang disebut *isomorphism*, yaitu mekanisme yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengadopsi beberapa praktik dan/atau struktur selama waktu yang diperlukan sebagai repons atas tekanan

institusional yang timbul dalam tingkatan organisasi. Terdapat 3 (tiga) *isomorphism* yaitu *normative isomorphism*, *mimetic isomorphism* dan *coercive isomorphism*.

Menurut DiMaggio dan Powell dalam Carpenter dan Feroz (2001), *normative isomorphism* adalah perubahan organisasi melalui peran dari suatu kelompok profesional dalam memperjuangkan praktik yang seharusnya di adopsi atau dilakukan sedangkan *mimetic isomorphism* dilakukan melalui peniruan dengan terhadap organisasi lain yang sukses melakukan adopsi atau yang telah memiliki legitimasi, terakhir, *coercive isomorphism* dilakukan dengan organisasi berubah melalui tekanan dari organisasi lain yang mempunyai pengaruh yang kuat sehingga organisasi yang merespon mempunyai ketergantungan yang besar (Carpenter & Feroz, 2001).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini melalui pendekatan studi kasus dan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Metode campuran dilakukan dimana peneliti percaya bahwa cara pandang melalui metode kualitatif dan kuantitatif berguna untuk menjelaskan pertanyaan penelitian, metode campuran juga menawarkan pendekatan pendekatan yang lebih kaya dan menyediakan jawaban yang lebih terjamin (Shauki, 2018). Sedangkan pendekatan studi kasus sangat sesuai untuk pertanyaan penelitian, yaitu mengapa Inspektorat belum memiliki pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SPIP (*why*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab bagaimana persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang penerapan SPIP dan bagaimana rekomendasi Keputusan Inspektur tentang Pedoman pelaksanaan pelaksanaan SPIP yang tepat untuk dapat diterapkan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (*how*). Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut memerlukan pemahaman yang rinci terhadap proses sosial dan organisasi karena kekayaan data yang dikumpulkan (Shauki, 2018).

Pengumpulan Data

Sumber bukti yang digunakan dalam studi kasus adalah dokumentasi, arsip catatan, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan artefak fisik (Yin, 2009). Penulis menggunakan data primer berupa wawancara kepada auditor BPKP, Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan (Kasubbag PKA) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Pembantu dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) serta menggunakan kuesioner kepada staf Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur yang diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan. Wawancara kepada auditor BPKP dilakukan untuk mengetahui Peraturan Kepala (Perka) BPKP mana yang dapat dijadikan acuan pembuatan pedoman pelaksanaan SPIP dan wawancara kepada Kasubbag PKA dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pembuatan pedoman pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Data primer lainnya diambil melalui kuesioner yang dibagikan ke pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yang sudah disiapkan lebih dahulu (*close ended question*) serta isian terbuka (*open ended question*). Skoring menggunakan skala Likert untuk menilai respon dari responden

Kuesioner terdiri atas 2 bagian yang berasal dari elaborasi yang dibuat sendiri oleh penulis. Bagian pertama akan mempertanyakan persepsi terhadap Pedoman pelaksanaan SPIP untuk mengetahui sejauh mana responden setuju/tidak setuju terhadap pedoman pelaksanaan dan masukan-masukan yang mereka usulkan. Kuesioner dibagikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 255 orang.

Untuk mengolah bukti dari hasil kuesioner, digunakan metode statistika deskriptif, yaitu bagian dari ilmu statistika yang membahas tentang cara mengumpulkan bukti, melakukan pengolahan bukti, melakukan penyajian bukti, menentukan nilai-

nilai statistika dan melakukan pembuatan gambar mengenai sesuatu yang akan dibahas (Suparmi, 2014). Untuk menganalisis hubungan antara hasil kuesioner dengan demografi responden, digunakan analisis tabulasi silang, analisis tabulasi silang bertujuan untuk menghitung frekuensi antara 2 (dua) atau lebih variabel sekaligus dengan cara melakukan penyilangan variable-variabel yang dianggap berhubungan sehingga dapat dihasilkan makna secara deskriptif antara hubungan variabel satu dengan lainnya (Suparmi, 2014).

Untuk menentukan Peraturan Kepala (Perka) BPKP yang menjadi acuan dalam penyusunan persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP, penulis melakukan wawancara kepada Ibu RKW, Koordinator pengawas pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang juga merupakan salah satu anggota tim penyusun pedoman penyelenggaraan SPIP.

Pertanyaan kedua menyangkut faktor-faktor penyusunan kebijakan publik dalam hal ini pedoman pelaksanaan SPIP dalam kerangka teori institusional. Untuk mengolah data dari hasil studi literatur, wawancara dan kuesioner yang telah dikumpulkan, digunakan metode *content analysis*.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu penulis dalam melakukan pengumpulan data dan untuk membantu agar pengumpulan data lebih terstruktur dan sistematis. Instrumen penelitian terdiri dari studi literatur, kuesioner dan wawancara.

Studi literatur dilakukan terhadap dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh landasan teori dalam penyusunan SPIP yang terdiri dari penelitian terdahulu, media daring dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada auditor BPKP, Kasubbag PKA, Inspektur Pembantu dan P2UPD. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara *semi-structured* (Shauki, 2018). Sedangkan kuesioner yang digunakan menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Sangat Setuju (SS) dengan

nilai 4, Setuju (S) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *single case study*, *Single case study* adalah studi kasus yang berisikan satu *unit* (Yin, 2009). Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan dengan metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian dilakukan untuk melakukan analisis bagaimana persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terhadap Pedoman pelaksanaan SPIP yang disusun oleh BPKP untuk dijadikan acuan pembuatan pedoman pelaksanaan di Inspektorat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan pedoman pelaksanaan SPIP sebagai suatu kebijakan publik.

Hasil dan Temuan

1. Wawancara

Untuk mengetahui persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terhadap pedoman penyelenggaraan SPIP, penulis terlebih dahulu menentukan Perka BPKP mana yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RKW, Koordinator pengawas pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebaiknya mengadopsi Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP karena Perka tersebut merupakan Perka yang paling sederhana, mencakup semua unsur-unsur SPIP dan merupakan pengembangan dari pedoman-

pedoman sebelumnya dibandingkan pedoman penyelenggaraan SPIP lain yang telah dikeluarkan oleh BPKP. Setelah mendapatkan Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP, penulis kemudian merangkum Perka BPKP tersebut. Hasil rangkuman Perka BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2013) adalah sebagai berikut:

Konsep/Gambaran Penyelenggaraan SPIP, pengertian SPIP adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara kontinyu oleh pimpinan instansi beserta seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi. SPIP bertujuan untuk terciptanya kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, aset yang tersimpan dengan baik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Lingkungan pengendalian terkait kondisi dalam instansi yang mendukung pentingnya pengendalian dalam menjalankan aktivitas. Penilaian risiko terdiri dari kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi. Kegiatan pengendalian yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Informasi dan komunikasi terkait penggunaan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan disampaikan untuk mendapatkan *feedback*. Unsur terakhir, pemantauan, yaitu penilaian atas kinerja system pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi yang dilakukan telah ditindaklanjuti.

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP terdiri dari SPI sebagai proses yang menyatu dan integral dengan kegiatan atau instansi kegiatan secara terus menerus (*continues built in*), SPI dipengaruhi oleh faktor manusia, SPI memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut, SPI dilaksanakan sesuai dengan

ukuran, kebutuhan kompleksitas, tugas, sifat dan fungsi instansi pemerintah.

Penyusunan profil risiko terdiri dari kegiatan mengidentifikasi sasaran/tujuan instansi pemerintah, melakukan perumusan lingkungan pengendalian yang ingin dicapai dan melakukan penilaian risiko yang akan dihadapi dalam pencapaian sasaran/tujuan.

Identifikasi sasaran/tujuan instansi pemerintah terdiri dari persiapan untuk melakukan identifikasi sasaran/tujuan dari kegiatan/unit dengan melakukan pengumpulan data untuk melakukan identifikasi sasaran/tujuan dari kegiatan/unit, melakukan identifikasi sasaran/tujuan dengan perumusan sasaran/tujuan aktual dari unit kerja dengan tepat, melakukan validasi hasil dari identifikasi sasaran/tujuan, melakukan konfirmasi/klarifikasi sasaran/tujuan yang hendak dicapai dengan pimpinan, melakukan perumusan lingkungan pengendalian yang ingin dicapai dan melakukan penilaian risiko yang akan dihadapi dalam pencapaian sasaran/tujuan.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yaitu melakukan penyusunan RTP lingkungan pengendalian, menyusun rencana tindak untuk melakukan kontrol atas risiko, melakukan penetapan rencana komunikasi dan informasi pengendalian, menetapkan rencana pemantauan atas perbaikan pengendalian dan melakukan penyelesaian RTP.

2. Kuesioner

Data pada penelitian ini berasal dari 2 (dua) set kuesioner, set pertama untuk mengetahui persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pemahaman atas penyelenggaraan SPIP berdasarkan Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 dan set kedua untuk mengetahui persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang faktor apa yang paling diperlukan bagi penyusunan Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sampai Pedoman pelaksanaan tersebut sampai pada tahap legitimasi. Sedangkan hasil kuesioner set kedua adalah untuk menentukan faktor

yang sudah tersedia/terpenuhi dan diperlukan bagi penerapan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 255 pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 24 pejabat struktural, 115 pejabat fungsional dan 116 staff fungsional umum. Pendistribusian kuesioner dilakukan dalam kurun waktu selama 3 minggu kepada seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI pada tanggal 5 April 2019 sampai dengan 26 April 2019. Dari 255 kuesioner yang telah disebar, sebanyak 132 kuesioner telah dikembalikan atau sebesar 51,76% dari seluruh kuesioner. Rincian penerimaan dan pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Total Pengiriman Kuesioner	255
2	Kuesioner Kembali	132
3	Kuesioner Tidak Dikembalikan	123
4	Kuesioner Tidak Dapat Digunakan	0
5	Tingkat Pengembalian / <i>Response Rate</i>	51,76%

Sumber: Data diolah, 2019

Demografi responden terdiri dari lama bekerja, jabatan, tingkat pendidikan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP. Demografi lama bekerja terdiri dari lama bekerja kurang dari 10 tahun, antara 10-20 tahun dan lebih dari 20 tahun. Demografi jabatan terdiri dari jabatan struktural/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Demografi tingkat pendidikan terdiri dari S1/D3 dan S2. Demografi tingkat Pendidikan terdiri dari Ekonomi/Akuntansi/Manajemen dan lainnya. Demografi pengalaman Diklat SPIP terdiri dari sudah dan belum pernah Diklat.

Hasil dari kuesioner set pertama adalah reratanya sebesar 2,95. Ini berarti seluruh responden cenderung menyatakan setuju atas

seluruh pertanyaan walaupun tidak mencapai batas persetujuan yang tegas sebesar 3. Jika dilihat secara khusus pada pertanyaan 13, tampak bahwa rata-rata responden juga memberi persepsi yang hampir setuju walaupun tak tegas terhadap keinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP Nomor 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian. Hal ini terlihat dari skor rerata terhadap pertanyaan 13 sebesar 2,92.

Kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa penerapan SPIP di lingkungan Inspektorat dengan menggunakan Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 menjadi meragukan. Hal ini perlu dicermati dengan melihat persepsi atas pertanyaan-pertanyaan spesifik lainnya. Jika rerata total sebesar 2,95 menunjukkan kecenderungan ketidaksetujuan, maka pertanyaan lain yang perlu diperlu dicermati adalah yang mendapatkan rerata yang rendah.

Pertanyaan yang menunjukkan ketidaksetujuan yaitu pada pertanyaan “saya sudah memahami proses penerapan SPIP dalam kegiatan saya sehari-hari tetapi masih membutuhkan pemahaman lebih jauh tentang penyusunan Rencana Tindak Pengendalian” (pertanyaan 10), “saya sudah pernah membaca isi Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator” (pertanyaan 3), “saya sudah memahami proses penerapan SPIP dalam kegiatan saya sehari-hari tetapi masih membutuhkan pemahaman lebih jauh tentang penilaian lingkungan pengendalian” (pertanyaan 8) dan “saya sudah memahami proses penerapan SPIP dalam kegiatan saya sehari-hari tetapi masih membutuhkan pemahaman lebih jauh tentang analisis risiko” (pertanyaan 9).

Ketidaksetujuan penerapan Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 secara substansial terkait dengan kekurangpahaman responden akan Perka itu sendiri. Persepsi ini ditarik dari pertanyaan 3 yang mempertanyakan sejauh mana responden telah membaca Perka itu mendapat rerata 2,77. Konsekuensi dengan pengakuan belum membaca ini responden pun mengakui bahwa mereka belum memahami mengenai komponen SPIP khususnya

pemahaman lingkungan pengendalian dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian.

Analisis tabulasi silang terhadap pertanyaan 3 “saya sudah pernah membaca isi Perka BPKP No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator” pada demografi lama bekerja, paling tinggi berasal dari lama bekerja > 20 tahun (89,68%), diikuti lama bekerja 10-20 tahun (84%) dan terendah lama bekerja < 10 tahun (67,21%). Pada demografi jabatan, kesetujuan yang tinggi berasal dari jabatan struktural dan JFT (86,75%) dan rendah berasal dari JFU (61,62%). Pada demografi tingkat Pendidikan, kesetujuan yang tinggi berasal dari S2 (80,00%) dan yang rendah berasal dari tingkat S1 dan D3 sebesar (76,09%). Demografi latar belakang Pendidikan, kesetujuan yang lebih tinggi diperoleh dari pendidikan lainnya (82,35%), kesetujuan yang rendah berasal dari ekonomi, manajemen dan akuntansi (71,88%), hal ini terlihat kontradiktif mengingat system pengendalian internal sebagai suatu mata ajaran lebih umum diberikan pada bidang studi ekonomi, manajemen dan akuntansi tetapi justru pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi, manajemen dan akuntansi menunjukkan kecenderungan tidak membaca. Terakhir berdasarkan pengalaman Diklat SPIP, kesetujuan yang tinggi berasal dari responden pernah Diklat (89,47%) dan yang lebih rendah berasal dari pegawai yang belum pernah Diklat (72,34%).

Hasil dari kuesioner set 2 reratanya adalah sebesar 2,93. Ini berarti seluruh responen cenderung menyatakan setuju atas seluruh pertanyaan walaupun tidak tegas karena tidak mencapai rerata 3. Persetujuan yang paling menonjol yaitu yang reratanya tertinggi adalah yang diberikan kepada pertanyaan 1 dan 10 dengan rerata 3,17 dan 3,18. Pertanyaan 1 yaitu “Keberhasilan penerapan SPIP sudah jelas menjadi salah satu ukuran kinerja kunci yang dituntut secara normative dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta” dan pertanyaan 10 yaitu “Kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta dewasa ini kondusif bagi peningkatan tuntutan profesional dan politis

serta kondisi perekonomian kondusif bagi penyediaan sumber daya bagi penerapan SPIP.” Berdasarkan kata kunci pada pertanyaan 1 dan 10, yaitu kata secara *normative*, profesional, standar dan sasaran kebijakan pada pertanyaan 1 serta kondisi sosial politis dan kondisi perekonomian jika dikaitkan dengan *institutional isomorphism* maka pertanyaan 1 merupakan *normative isomorphism* dan pertanyaan 10 merupakan *coercive isomorphism*.

Pertanyaan 1 merupakan *normative isomorphism* karena Standar dan sasaran kebijakan suatu organisasi yang dituangkan menjadi ukuran kinerja kunci pada Inspektorat merupakan suatu penanda praktik manajemen yang profesional. Sedangkan pertanyaan 10 merupakan *coercive isomorphism* karena pendapatan dan belanja daerah Pemprov DKI Jakarta sangat bergantung pada kondisi ekonomi daerah dan nasional, jika kondisi ekonomi kondusif dan mendukung kegiatan usaha, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan cenderung naik, hal itu berlaku pula sebaliknya, oleh karena itu, lingkungan ekonomi termasuk ke dalam *coercive isomorphism*.

Analisis tabulasi silang pada pertanyaan 1 set 2 yaitu, pada demografi lama bekerja, paling tinggi berasal dari lama bekerja lebih dari 20 tahun (95,65%), diikuti lama bekerja antara 10-20 tahun (92%) dan terendah lama bekerja di bawah 10 tahun (83,64%). Pada demografi jabatan, kesetujuan yang relatif sama pada jabatan struktural dan JFT (89,16%) dan JFU (89,8%). Pada demografi tingkat pendidikan, kesetujuan yang relatif tinggi berasal dari S1 dan D3 (95,65%) yang rendah berasal dari tingkat S2 sebesar (90%), hal ini kontradiktif secara institusional jika dikaitkan pendidikan tinggi diasosiasikan dengan kepedulian profesionalisme yang juga tinggi. Pada demografi latar belakang pendidikan, kesetujuan yang relatif sama ,ekonomi, manajemen dan akuntansi (92,19%) dibandingkan pendidikan lainnya (95,59%). Terakhir, pada demografi pengalaman diklat SPIP, kesetejuan yang relatif sama, pernah Diklat (94,74%) dibandingkan yang belum pernah Diklat (93,62%).

Hasil wawancara kepada responden juga menunjukkan kecenderungan kepada *normative isomorphism*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag PKA. Kasubbag PKA menyatakan bahwa penerapan pedoman pelaksanaan SPIP hendaknya dilakukan dengan adanya kemauan dari pimpinan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Wawancara lain dengan Inspektur Pembantu Bidang IV menyatakan bahwa Pelaksana dan pembuat kebijakan harus memiliki komitmen serta harus konsisten dalam melaksanakan implementasi kebijakan, karena komitmen tanpa konsistensi tidak akan cukup. Wawancara kepada P2UPD Madya juga menyatakan hal yang hampir sama, yaitu kebijakan, apapun kebijakan itu jika tidak dilakukan sosialisasi oleh orang yang kompeten pada bidangnya maka kebijakan itu tidak akan berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga responden tersebut di atas, dalam penerapan SPIP dititikberatkan pada kemauan pimpinan, komitmen dan konsistensi pelaksana dan pembuat kebijakan dan sosialisasi kebijakan oleh yang kompeten. Hal ini sesuai dengan *normative isomorphism* dimana perubahan terjadi karena keinginan dari kalangan profesional baik itu penyusun maupun pelaksana kegiatan.

Analisis tabulasi silang pada pertanyaan 10 set 2 yaitu pada demografi lama bekerja, paling tinggi berasal dari lama bekerja lebih dari 20 tahun (95,65%), diikuti lama bekerja 10-20 tahun (92%) dan terendah lama bekerja kurang dari 10 tahun (83,64%). Pada demografi jabatan, kesetujuan yang relatif sama, jabatan struktural dan JFT (89,16%) dan JFU (89,8%). Pada demografi tingkat pendidikan, kesetujuan yang tinggi berasal dari S2 (95%) yang rendah berasal dari tingkat S1 dan D3 sebesar (89,96%). Pada Demografi latar belakang pendidikan, kesetujuan yang tinggi berasal dari ekonomi, manajemen dan akuntansi (92,19%) dibandingkan pendidikan lainnya (86,76%). Terakhir pada demografi pengalaman diklat SPIP, kesetujuan yang relatif tinggi berasal dari pernah Diklat (94,74%) dibandingkan yang belum pernah Diklat (87,32%).

Hasil wawancara kepada responden kuesioner juga menunjukkan kecenderungan *coercive isomorphism*, yang menyatakan bahwa pelaksanaan SPIP dapat berhasil jika didukung dengan sistem pengendalian pengawasan, SDM yang mumpuni, ketersediaan alat dan sarana dan prasarana.

Dari ketiga isomorphism yang dikenal dalam teori institusional, ternyata hanya mimetic isomorphism tidak dipersepsikan sebagai faktor yang penting bagi penerapan SPIP dengan mengadopsi Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 karena hanya mendapat rerata 2,96.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan kepada para pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa Rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP Nomor 10 tahun 2013 dipakai secara utuh tanpa penyesuaian.

Ketidaksetujuan atas penerimaan Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 terutama oleh kondisi bahwa responden belum membaca Perka dan belum memahami penyusunan RTP, penilaian lingkungan pengendalian dan analisis risiko;

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaktegangan persetujuan bagi penerapan SPIP adalah terkait dengan kurangnya profesionalisme pegawai Inspektorat yang diwajibkan mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan.

Kondisi kurangnya pemahaman karena kurangnya profesionalisme terkonfirmasi dari faktor yang paling menentukan pada keberhasilan penerapan SPIP menurut hasil kuesioner adalah melalui *normative isomorphism* dan *coercive isomorphism*.

Keterbatasan Penelitian dan Usulan Penelitian Selanjutnya

Batasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang terbatas pada salah satu SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yaitu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan subjek penelitian ini adalah Inspektorat

Provinsi DKI Jakarta. Interpretasi yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada temuan-temuan dari persepsi pegawai Inspektorat Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak pasti sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan untuk entitas lain

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar penelitian selanjutnya melakukan studi kasus serupa ini pada berbagai inspektorat lain secara jamak, tidak secara tunggal untuk memungkinkan generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017). Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP (2013).
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). Institutional theory and accounting rule choice: an analysis of four US state governments' decisions to adopt GAAP. *Accounting, Organizations and Society*, 26, 565–596. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0361-3682\(00\)00038-6](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0361-3682(00)00038-6)
- Irawan, R. H. (2016). *Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah*. Universitas Lampung.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2010). Indonesia: Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Rahadian, A. P. (2011). Analisis Impelementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Keuangan. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008). Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ridha, M. A. (2012). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Seminar Nasional Akuntansi*, (SNA 15 Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat 20-23 Sept 2012), 1–28. Retrieved from <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/10/SNA-15-046.pdf>
- Shauki, E. R. (2018). Converting Your Master/PhD Thesis into a Journal Article, Handout, Case Writing and Methodology, ECAM 809303. Jakarta: University of Indonesia.
- Suparmi, C. H. (2014). Konsep Dasar Statistika Definisi, 1–55.
- Suwitri, S. (2014). *Konsep Dasar Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wisasa, H. G., Hidayat, Z., & Widowati, N. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang (Solusi Pengurangan Timbunan Sampah di TPA Jati Barang).
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research Design and Methods* (Fourth). Thousand Oaks: SAGE.